

TUGAS AKHIR

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU LOKASI PUSAT
PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
DI KECAMATAN GEDEBAGE**

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Strata Satu (S1)

Oleh :

TUAH HADDID ALGHAZALI

NRP : 143060072



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2022

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU LOKASI
PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
DI KECAMATAN GEDEBAGE**

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

TUAH HADDID ALGHAZALI

143060072

Bandung, Januari 2022

Menyetujui :

- | | | |
|--|---------------------------|-------|
| 1. Dr. Ir. Firmansyah, MT. | (Ketua Sidang) | |
| 2. Dr. Ir. Firmansyah, MT. | (Pembimbing Utama) | |
| 3. Fury Sari Nurwulandari, ST., MT. | (Co-Pembimbing) | |
| 4. Myeliana Lisanti, ST., MT | (Penguji) | |

Mengetahui,

Koordinator TA dan Sidang Sarjana

**Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota**

(Dr. Ir. Firmansyah, MT.)

(Deden Syarifudin, ST., MT.)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU LOKASI
PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
DI KECAMATAN GEDEBAGE**

TUGAS AKHIR



NAMA : Tuah Haddid Alghazali

NRP : 143060072

Mengetahui/Menyetujui

(Dr. Ir. Firmansyah, MT.)

Pembimbing Utama

(Fury Sari Nurwulandari, ST., MT.)

Co-Pembimbing

ABSTRAK

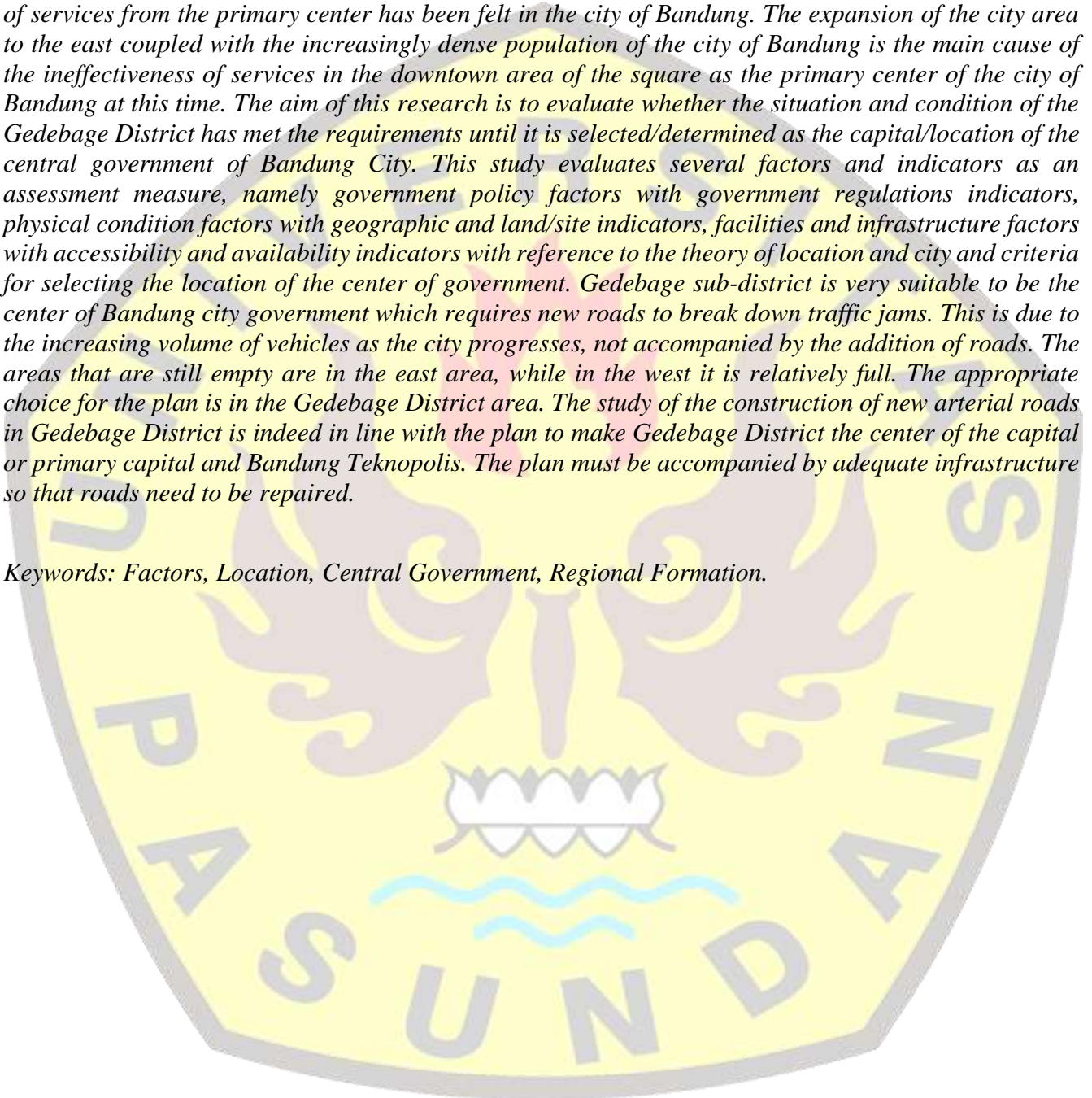
Pertumbuhan Kota menyebabkan perluasan kawasan terbangun ke daerah pinggiran. Pada pertengahan hingga akhir abad ke 20 lokasi kegiatan mengalami perpindahan daerah pinggiran. Pada studi kasus Kota Bandung aktivitas atau kegiatan masih didominasi di sekitar pusat kota bagian barat. Ketidakefektifan pelayanan dari pusat primer telah dirasakan pada Kota Bandung. Perluasan Wilayah kota ke arah timur yang dibarengi dengan semakin padatnya populasi penduduk Kota Bandung merupakan penyebab utama dari ketidakefektifan pelayanan kawasan pusat kota alun-alun sebagai pusat primer Kota Bandung saat ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengevaluasi apakah situasi dan kondisi Kecamatan Gedebage sudah memenuhi syarat hingga dipilih/ditetapkan sebagai ibukota/lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung. Penelitian ini mengevaluasi dari beberapa faktor dan indikator sebagai ukuran penilaian yaitu faktor kebijakan pemerintah dengan indikator peraturan pemerintah, faktor kondisi fisik dengan indikator letak geografi dan lahan/site, faktor sarana dan prasarana dengan indikator aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas dengan mengacu pada teori lokasi dan kota dan kriteria pemilihan lokasi pusat pemerintahan. Kecamatan Gedebage sangat sesuai untuk dijadikan pusat pemerintahan kota Bandung yang membutuhkan jalan-jalan baru untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh volume kendaraan yang terus bertambah seiring kemajuan kota tidak diiringi dengan penambahan jalan. Wilayah yang masih kosong itu di daerah timur, sedangkan di daerah barat relatif penuh. Pilihan yang sesuai untuk rencana tersebut adalah di wilayah Kecamatan Gedebage. Kajian pembangunan jalan arteri baru di Kecamatan Gedebage memang sejalan dengan rencana menjadikan Kecamatan Gedebage sebagai pusat ibukota atau ibukota primer dan Bandung Teknopolis. Rencana tersebut harus diiringi dengan infrastruktur yang memadai sehingga jalan perlu di diperbaiki.

Kata Kunci : Faktor, Lokasi, Pusat Pemerintahan, Pembentukan Wilayah.

ABSTRACT

The growth of the city causes the expansion of the built area to the outskirts. In the mid to late 20th century, the location of the activity experienced a shift to the periphery. In the case study of the city of Bandung, activities or activities are still dominated around the western city center. The ineffectiveness of services from the primary center has been felt in the city of Bandung. The expansion of the city area to the east coupled with the increasingly dense population of the city of Bandung is the main cause of the ineffectiveness of services in the downtown area of the square as the primary center of the city of Bandung at this time. The aim of this research is to evaluate whether the situation and condition of the Gedebage District has met the requirements until it is selected/determined as the capital/location of the central government of Bandung City. This study evaluates several factors and indicators as an assessment measure, namely government policy factors with government regulations indicators, physical condition factors with geographic and land/site indicators, facilities and infrastructure factors with accessibility and availability indicators with reference to the theory of location and city and criteria for selecting the location of the center of government. Gedebage sub-district is very suitable to be the center of Bandung city government which requires new roads to break down traffic jams. This is due to the increasing volume of vehicles as the city progresses, not accompanied by the addition of roads. The areas that are still empty are in the east area, while in the west it is relatively full. The appropriate choice for the plan is in the Gedebage District area. The study of the construction of new arterial roads in Gedebage District is indeed in line with the plan to make Gedebage District the center of the capital or primary capital and Bandung Teknopolis. The plan must be accompanied by adequate infrastructure so that roads need to be repaired.

Keywords: Factors, Location, Central Government, Regional Formation.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan sasaran	3
1.3.1. Tujuan.....	3
1.3.2. Sasaran	3
1.4 Ruang Lingkup	4
1.4.1 Ruang Lingkup wilayah.....	4
1.4.2 Ruang Lingkup Substansi	4
1.5 Batasan Studi.....	5
1.6 Metodologi Penelitian	5
1.6.1 Metode Pendekatan.....	5
1.6.2. Metoda Pengumpulan Data.....	5
1.6.3 Metode Analisis	6
1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN TEORI.....	14
2.1 Pengertian Kota	14
2.2 Tipe Ibu Kota.....	15
2.3 Faktor Dalam Perkembangan Kota	17
2.4 Pembentukan wilayah.....	18

2.5	Definisi Pemerintahan	19
2.6	Konsep Pemerintahan Daerah	20
2.6.1	Inovasi Pemerintahan.....	20
2.6.2	Teori Inovasi Pelayanan Publik	21
2.6.3	Hubungan Kerjasama Antara Lembaga Pemerintah.....	22
2.7	Definisi Pusat Pemerintahan.....	23
2.8	Tujuan Pusat Pemerintahan	23
2.9	Fungsi Pusat Pemerintahan.....	24
2.10	Pemindahan ibu Kota dan Pusat Pemerintahan sebagai Kebijakan Perkotaan	25
2.11	Teori Lokasi.....	27
2.12	Teori Pendukung Lokasi.....	27
2.12.1	Pendekatan Keruangan (Spatial Approach).....	28
2.12.2	Pendekatan Ekologis (Ecological Approach)	28
2.12.3	Pendekatan Kompleks Wilayah (Regional Complex Approach)	28
2.13	Teori Pemusatan	29
2.14	Teori Kutub dan Pusat Pertumbuhan.....	29
2.15	Faktor Penentu Lokasi	30
2.16	Faktor Lokasi Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan	31
2.17	Letak Geografi.....	32
2.18	Kondisi Fisik	33
2.19	Aksesibilitas Transportasi	35
2.20	Kependudukan.....	36
2.21	Ketersediaan Fasilitas.....	36
2.22	Kebijakan.....	39
2.23	Studi Terdahulu	42

BAB III GAMBARAN UMUM.....	44
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Gedebage	44
3.2. Kependudukan.....	52
3.3. Faktor Faktor Penentuan Lokasi Pusat Pemerintahan	57
3.3.1. Faktor Kebijakan Pemerintah.....	57
3.3.2. Kondisi Fisik	66
3.3.3. Sarana dan Prasarana.....	78
BAB IV ANALISIS	8
4.1. Analisis Kriteria Pemilihan Lokasi Pemerintahan di Kota Bandung.....	86
4.1.1. Hasil Penilaian Kriteria Utama	86
4.1.2. Evaluasi Hasil	87
1. Faktor Kebijakan Pemerintah.....	97
2. Faktor Fisik.....	101
3. Faktor Sarana dan Prasarana.....	117
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	123
5.1. Kesimpulan.....	123
5.2. Rekomendasi	125
5.3. Kelemahan Studi	126
5.4. Studi Lanjutan	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada studi kasus Kota Bandung, aktivitas atau kegiatan masih didominasi di sekitar pusat kota bagian barat. Ketidakefektifan pelayanan dari pusat primer telah dirasakan pada Kota Bandung. Perluasan Wilayah kota ke arah timur yang dibarengi dengan semakin padatnya populasi penduduk Kota Bandung merupakan penyebab utama dari ketidakefektifan pelayanan kawasan pusat kota alun-alun sebagai pusat primer Kota Bandung saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tingkat ketergantungan seluruh bagian wilayah kota Bandung terhadap Pusat primer semakin meningkat dan juga berdampak terutama bagi penduduk di wilayah Bandung timur yang secara geografis memiliki jarak yang paling jauh dibandingkan dengan bagian wilayah kota Bandung lainnya. Oleh sebab itu pemerintah berencana membentuk pusat kegiatan baru yakni Pusat Pelayanan Gedebage dibagian timur untuk mengurangi kepadatan di pusat kota bagian barat (Peraturan Daerah RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031).

Kota Bandung memiliki kebijakan utama dalam struktur ruang yaitu mengembangkan dua pusat primer untuk Bandung Barat dan Bandung Timur yang tertuang pada Rencana Tata Ruang Kota Bandung 2011-2031. Pengembangan dua pusat primer ini merupakan upaya untuk mengubah struktur ruang dari satu pusat menjadi dua pusat. Secara geografis, dua pusat primer yang terletak pada wilayah Bandung Barat yaitu alun-alun dan wilayah Bandung Timur yaitu Gedebage yang sinergis dengan pusat sekunder yang direncanakan akan memberikan pelayanan yang lebih menyebar, sehingga mengurangi ketergantungan warga kota terhadap pusat primer lama. Gedebage dijadikan sebagai pusat primer karena masih banyaknya potensi lahan kosong yang berupa lahan persawahan dan hutan yang dapat memudahkan perancangan dan pembangunan sehingga dapat dikembangkan serta dapat menjadi daya tarik investor untuk mengembangkan kawasan tersebut yang sudah didukung dengan adanya terminal peti kemas yang melayani hingga skala nasional, pembangunan terminal terpadu, akses tol dan lainnya.

Teknopolis merupakan suatu Istilah yang merujuk kepada konsep pengembangan suatu kawasan, baik yang berada di perkotaan, pinggiran kota, maupun perdesaan yang didominasi oleh keberadaan industri berteknologi tinggi dengan kegiatan penelitian, pengembangan dan juga manufaktur (Castell & Hall, 1999). Teknopolis merupakan pembaharuan dari rencana pembangunan Kawasan Pertumbuhan Primer di Gedebage. Teknopolis dikonsepsikan sebagai kota kecil di dalam Kota Bandung yang berbasis Teknologi Informasi (IT). Berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan, kawasan Teknopolis bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Jika sudah berdiri kokoh, diprediksi akan ada 400.000 lapangan pekerjaan hadir di kawasan tersebut (Avitia Nurmatari, 2015).

Pelayanan pemerintah sebagai pelayanan publik yang optimal menjadi salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Perkembangan Kota Bandung yang cukup pesat perlu diimbangi oleh adanya pusat pelayanan public atau pemerintahan yang berada pada lokasi yang optimal sehingga dapat diakses secara mudah oleh seluruh penduduk Kota Bandung. Pelayanan pemerintahan saat ini belum optimal dikarenakan lokasi dan letak kantor pemerintahan di Kota Bandung tidak berada pada satu kawasan yang terpadu akibat minimnya lahan di Pusat Kota Bagian Barat. Untuk mengatasi hal tersebut maka terdapat rencana pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah lain yakni pada Pusat Pelayanan Gedebage. Berdasarkan RDTR Kota Bandung tahun 2015, lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung diarahkan pada SWK Gedebage, dimana tujuan penataan ruangnya yaitu sebagai pengembangan kawasan yang bersinergikan antara pendidikan tinggi, ekonomi kreatif, komersial, dan pusat pemerintahan berkonsep teknopolis dalam mewujudkan fungsi Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage. Selain itu, luas lahan yang tersedia pada SWK Gedebage yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan yaitu seluas 12,96 Ha (Peraturan daerah nomor 10 Tahun 2015 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bandung).

Berdasarkan RDTR Kota Bandung, lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung diarahkan pada SWK Gedebage. SWK Gedebage terdiri

atas dua Kecamatan yaitu Kecamatan Gedebage dan Kecamatan Rancasari. Penentuan lokasi baru pusat pemerintahan pada kecamatan Gedebage dilakukan berdasarkan atas arahan pengembangan RTRW kota Bandung Tahun 2011-2031. Lokasi Pusat Pemerintahan Kota Bandung yang baru, direncanakan akan berada di Kecamatan Gedebage kelurahan Cimencrang karena berada pada lokasi persawahan yang belum digunakan untuk bangunan apapun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan berdasarkan RKPD kota Bandung tahun 2006, RDTR SWK Gedebage 2021-2041, RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031, teori dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan beberapa persoalan yang menjadi landasan dalam studi ini, antara lain:

1. Adanya rencana pengembangan pusat kegiatan ke arah Bandung bagian timur karena padatnya kegiatan pada pusat kota Bandung Bagian Barat (RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031).
2. Pelayanan pemerintahan saat ini yang belum optimal dikarenakan lokasi dan letak kantor pemerintahan di Kota Bandung tidak berada pada satu kawasan yang terpadu (Peraturan daerah nomor 10 Tahun 2015 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bandung).
3. Perkembangan Kota Bandung yang cukup pesat perlu diimbangi oleh adanya pusat pelayanan public atau pemerintahan yang berada pada lokasi yang optimal sehingga dapat diakses secara mudah oleh seluruh penduduk Kota Bandung (RDTR Kota Bandung tahun 2015).

Dari rumusan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu, apa saja faktor yang berpengaruh dalam merencanakan pusat pemerintahan Kota Bandung di Kecamatan Gedebage?

1.3 Tujuan dan sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah melakukan kajian pendekatan secara mendalam terhadap faktor analisis lokasi pusat pemerintahan Kecamatan Gedebage untuk memenuhi syarat hingga dipilih/ditetapkan sebagai ibukota/lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung dengan mengacu pada teori lokasi dan kota dan kriteria pemilihan lokasi

pusat pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya kondisi eksisting lokasi rencana pusat pemerintahan Kota Bandung.
2. Menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan tolok ukur yang telah dirumuskan oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Terumuskannya arahan pengembangan terhadap sarana prasarana berdasarkan kriteria yang sesuai pada lokasi pusat pemerintahan Kecamatan Gedebage terkait kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup wilayah

Berdasarkan RDTR Kota Bandung, lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung diarahkan pada SWK Gedebage. Lokasi Pusat Pemerintahan Kota Bandung yang baru, direncanakan akan berada di Kecamatan Gedebage kelurahan Cimencrang lokasi baru pusat pemerintahan pada kecamatan Gedebage dilakukan berdasarkan atas arahan pengembangan RTRW kota Bandung Tahun 2011-2031 yang ditetapkan pada perencanaan kota-RDTR SWK Gedebage 2021-2041.

Merujuk dokumen terkini Kecamatan Gedebage dalam Angka 2020 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, luas wilayah Kelurahan Cimencrang adalah 1,61 kilometer persegi. Luas wilayah yang berada di ketinggian 666 meter di atas permukaan air laut ini setara dengan 16,46 persen dari total luas wilayah Kecamatan Gedegabe.

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi merupakan penjelasan materi yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Implementasi Pemindahan lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung berdasarkan kebijakan terkait arahan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung yaitu teknopolis.
2. Mengidentifikasi kriteria pemilihan lokasi yang telah dirumuskan

dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota Bandung.

3. Merumuskan arahan pengembangan terhadap sarana prasarana berdasarkan kriteria yang sesuai pada lokasi pusat pemerintahan Kecamatan Gedebage terkait kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung.

1.5 Batasan Studi

Batasan studi digunakan dengan maksud untuk membatasi materi atau subjek yang dikaji. Adapun batasan dalam studi ini yaitu mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung yaitu pada lokasi Kecamatan Gedebage.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan yaitu Pendekatan *Mixed Methods* (Kuantitatif-Kualitatif). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat teknis analisis yang berupa angka-angka serta menggunakan metode kualitatif berupa deskripsi untuk memudahkan dalam memahami data atau hasil analisis yang telah dikaji. Berikut ini adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sasaran penelitian yang ingin dicapai.

1.6.2. Metoda Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

1. Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data ini merupakan suatu sumber data yang diperoleh langsung dari kondisi eksisting lapangan pada wilayah kajian. Cara untuk mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”.

Tujuan digunakannya observasi sebagai metode penelitian diantaranya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi pemerintahan yang baru.

Jenis-jenis observasi menurut Riyanto (2010:98-100) :

1) Observasi partisipan

Observasi partisipan adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi.

2) Observasi non Partisipan

Observasi dikatakan non partisipan apabila observer tidak ikut ambil bagian kehidupan observee.

3) Observasi sistematis (Structured observation)

Observasi sistematis, apabila pengamat menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.

4) Observasi non sistematis

Observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamatan.

5) Observasi eksperimental

Pengamatan dilakukan dengan cara observe dimasukkan ke dalam suatu kondisi atau situasi tertentu.

Jenis observasi yang diterapkan oleh peneliti yaitu jenis observasi non partisipan dan jenis observasi sistematis. Peneliti menggunakan observasi non partisipan karena dalam penelitiannya tidak ikut andil dalam segala macam kegiatan yang dilakukan observee. Penggunaan observasi sistematis bertujuan supaya observasi yang dilakukan oleh peneliti terstruktur, tidak keluar dari alur penelitian.

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (Supranto, 2000). Adapun objek dalam penelitian ini yaitu penilaian terhadap kebijakan pemindahan

lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung dari sisi sarana, geografi, kesesuaian lahan, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas, dan peraturan pemerintah pada Kecamatan Gedebage.

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Tempat merupakan daerah atau wilayah di mana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gedebage.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015), wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Topik yang ingin dicari dalam wawancara ini adalah mengenai identifikasi faktor atau kriteria pemilihan lokasi yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota Bandung.

Teknik sampling dilakukan dengan teknik non random sampling menggunakan teknik purposive sampling. Teknik non random sampling adalah teknik pengambilan data yang berdasarkan dengan pemilihan suatu karakteristik atau ciri-ciri untuk mendapatkan sampel relevan untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2010), purposive sampling adalah suatu teknik pengambilan sumber data dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Jumlah narasumber sebanyak 4 orang responden pada 2 instansi berbeda, yaitu karyawan BAPPELITBANG Kota Bandung dan karyawan BKPP. Kriteria responden yang dipilih diambil berdasarkan pertimbangan karena responden tersebut memiliki keterkaitan dan memiliki pengetahuan serta pemahaman

mengenai objek dalam penelitian ini.

Dalam wawancara terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data yaitu:

1. Membuat pedoman pertanyaan wawancara, sehingga pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tujuan wawancara tersebut.
2. Menentukan narasumber wawancara.
3. Menentukan lokasi dan waktu wawancara.
4. Melakukan proses wawancara
5. Dokumentasi
6. Memastikan hasil wawancara telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
7. Merekap hasil wawancara

c. Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis, 2008). Kuesioner yaitu rangkaian pertanyaan yang tertuang secara tertulis dalam bentuk lampiran pertanyaan yang disebarakan pada masyarakat di wilayah kajian.

Topik yang ingin dicari dalam kuesioner ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menentukan Lokasi Pusat Pemerintahan Kota Bandung.

Teknik sampling dalam penelitian penelitian ini dengan teknik non random sampling menggunakan teknik purposive sampling. Teknik non random sampling adalah teknik pengambilan data yang berdasarkan dengan pemilihan suatu karakteristik atau ciri-ciri untuk mendapatkan sampel relevan untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian.

Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi penelitian yang didasarkan atas ciri-ciri dan suatu karakteristik tertentu untuk mencapai tujuan penelitian yang dikehendaki oleh peneliti. Pada teknik purposive sampling, yang ditekankan untuk menjadi sampel adalah karena adanya pertimbangan karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Menurut Bernard (2002), Lewis & Sheppard (2006), purposive sampling atau bisa disebut dengan penghakiman sampel adalah suatu teknik yang disengaja oleh peneliti dari seorang informan berdasarkan kualitas yang dimiliki informan.

Responden dalam kuesioner ini adalah karyawan BAPPELITBANG Kota Bandung dan karyawan BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bandung). Jumlah total narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang dengan masing-masing intansi yaitu 2 orang narasumber. Kriteria responden yang dipilih diambil berdasarkan pertimbangan karena responden tersebut memiliki keterkaitan dan memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai objek dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data dari literatur yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah yang terkait ataupun yang secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) serta dari buku-buku yang datanya berhubungan dengan penelitian, dimana pengumpulan data sekunder ini disesuaikan dengan kebutuhan data (*checklist data*).

1.6.3 Metode Analisis

Metoda analisis yang digunakan dalam kajian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya diharapkan mampu menciptakan konsistensi analisis data secara riil. Mengingat penelitian kualitatif bersifat deskriptif, maka digunakan analisa data yang bersifat filosofis serta mengembangkan

logika analisis induktif untuk dapat menjelaskan kasus atau fenomena yang diteliti secara rinci. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara maupun hasil pengelompokan data, menyusun ke dalam pola dan diolah sedemikian rupa sehingga memperoleh kesimpulan berupa kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian (M.Hum.2010).

Adapun data yang didapatkan adalah dari informasi yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung. Informasi dan data yang telah terkumpul akan di seleksi sesuai dengan yang dibutuhkan sebagai bahan analisis. Seleksi dilakukan dengan memilih data dari informasi tambahan dan mana yang merupakan referensi utama dalam analisis data. Informasi yang diperoleh dari metode dokumentasi juga digunakan sebagai penguat data penelitian, terutama data statistik tentang Kecamatan Gedebage.

Tahap final dari analisis data yang akan menghasilkan suatu kesimpulan gambaran yang mendetail dan terinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung. Hasil penelitian ini akan menghasilkan gambaran kesimpulan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung.

Tabel I.3.
Matriks Metodologi

No	Tujuan	Sasaran	Ruang Lingkup	Sumber Data	Teknik Analisis
1	Melakukan kajian pendekatan secara mendalam terhadap faktor analisis lokasi pusat pemerintahan Kecamatan Gedebage untuk memenuhi syarat hingga dipilih/ditetapkan sebagai ibukota/lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung	Teridentifikasinya kondisi eksisting lokasi rencana pusat pemertintahan Kota Bandung	Mengidentifikasi Implementasi Pemindahan lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung berdasarkan kebijakan terkait arahan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung yaitu teknopolis	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung, dan pengamatan langsung	Analisis Deskriptif Kualitatif
2		Menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan tolok ukur yang telah dirumuskan oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.	Mengidentifikasi kriteria pemilihan lokasi yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota bandung	Buku, Jurnal, Tugas Akhir, Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan	Analisis Deskriptif Kualitatif
3		Terumuskannya arahan pengembangan terhadap sarana prasarana berdasarkan kriteria yang sesuai pada lokasi pusat pemerintahan Kecamatan Gedebage terkait kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung.	Merumuskan arahan pengembangan terhadap sarana prasarana berdasarkan kriteria yang sesuai pada lokasi pusat pemerintahan Kecamatan Gedebage terkait kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung	Gambaran umum lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung	Analisis Deskriptif Kualitatif

1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian pemilihan lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung terdiri dari 5 bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri atas ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, metodologi, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian tinjauan pustaka dibahas mengenai tinjauan singkat dan jelas mengenai teori, kebijakan, serta studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III Gambaran Umum

Pada bagian gambaran ini dibahas mengenai kondisi eksisting wilayah berdasarkan data-data berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Analisis

Pada bagian analisis dibahas mengenai analisa terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bagian kesimpulan dan rekomendasi dibahas mengenai kesimpulan, rekomendasi, kelemahan studi, dan studi lanjutan yang didasarkan kepada hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agassi, Ecky. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibukota Negara*. Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Bogor.
- Andirani, B. 2018. *Teori Pertumbuhan Kota*. Tersedia pada <http://www.p2kp.org>
- Aurumbita, Yuke Nori. 2015. *Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarbaru*, Universitas Gadjah Madha, Yogyakarta.
- Bintarto, R dan Surastopo Hadi Sumarno. 1981. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES
- Campbell, S. 2004. *The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era*. URRC. 03(08):1-32.
- Chamidah. 2017. *Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. Jurnal. Planta Tropika Journal of Argo Science Vol 3 No 2 / Agustus 2017.
- Detiawati, Venni, Meitaria, Gunung Radjiman. 2008. *Penetapan Pulau Dompok Sebagai Lokasi Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. <http://etd.repository.ugm.ac.id>
- Faizah. 2000, *Pertumbuhan Perkotaan Dalam Perspektif Sistem Ekologi*, Jurnal *Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.11, No.2/Juni 2000, 11:63-75, PPK-ITB.
- Fitria Nur Rohmah, Bakti Setiawan. 2018. *Pengaruh Pemindahan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Terhadap Perkembangan Perkotaan Boyolali*. Jurnal Teknosains. Volume 8 No. 1, 22 Desember 2018 Halaman 1-88.
- Fitrianto. 2016. *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gadjah Mada
- Harzan, M. 2015. *Analisis Lokasi Optimal Pusat Pemerintahan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah di Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara (Vol. I)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamirul, Hamirul. 2019. *Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam rangka mengatasi Patologi Pelayanan Publik*. Jurnal Marketing. Volume 2, 2, halaman .133-148.

- Hayat, Luthf. 2012. *Kapita Selekta Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Himayah. 2012. *Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya*. Jurnal Academia Praja 1: 129–148, 2018.
- Hutagalung. & Hermawan, D. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hutasoit, W.L. 2018. *Analisa Pemindahan Ibukota Negara. Dedikasi*. 19 (2): 108-128. Diakses dari <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/download/3989/3837>, pada 23 April 2021.
- Indra, D. 2010. *Keberlanjutan Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara dan Kota Pusat Pemerintahan*. Jakarta (ID): Kementerian PU RI. http://www.penataanruang.net/paper/KeynoteMPU_PSIL_221110.pdf
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB
- Kostof, Spiro. 1991. *The City Shapped: Urban Pattern and Meanings Throught History*. London: A Bulfinch Press Book
- Muhamad Harzan. 2015. *Analisis Lokasi Optimal Pusat Pemerintahan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara*. Naskah Publikasi. Akultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Moh. Fitra U. Ali. 2010. *Evaluasi lokasi pusat peemrintahan Kabupaten Halmahera Tengah*. <http://etd.repository.ugm.ac.id>
- Novita, Caecilia Rahardian, 2003, *Kajian Perkembangan Kawasan Koridor Jalan Pandanaran Semarang sebagai Kawasan Komersial Jasa dan Perdagangan ditinjau dari Aspek Perancangan Kota*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, UNDIP, Semarang.
- Nuzullia, Laella, Wisnu Pradoto. 2015. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perkembangan Kawasan Permukiman Terencana Kota Depok*. Jurnal Teknik PWK, Volume 4 Nomor 1 2015.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 10 Tahun 2015 *Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 – 2035*.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 18 Tahun 2011 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031*.

- Pantouw Christy E. , R. J. Poluan , & Octavianus H. A. Rogi. 2018. *Analisis Pengembangan Kawasan Agropolitan Rurukan Di Tomohon*. Jurnal Spasial, Vol 5. No. 3, 2018.
- Pattikawa, 2014. *Perpindahan Ibukota Negara Suatu Keharusan Atau Wacana?. Di dalam Diskusi Sejarah, Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah*; 2014 Apr 11-12; Yogyakarta (ID): Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta
- Pratiwi, Yahya. 2016. *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*. Jurnal Academia Praja 1: 129–148, 2018.
- Saaty, Thomas L. 1980, *Decision Making for Leader, The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World*, Prentice Hall Coy, Lad, Pinsburgh.
- Savitri, Astrid. 2010. *Masalah Tata Ruang Harus Jadi Fokus Pemerintah*. <https://economy.okezone.com/:.read/2016/11/03/470/1532118/> .
- Sirojuzilam.2006. *Teori Lokasi*. USU Press. Medan.
- Syahmat, Muh. Zulfiqri. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Tjiptono, Fandy. 2002, *Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta
- Tukiyat. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Bab 6: Pengantar Pengembangan Ekonomi Wilayah. Jakarta: BPPT.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*
- Wijaya, Hafidzh, Muhammad. 2015. *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Distribusi Suhu Permukaan Di Kabupaten Bandung*. Forum Geografi. Vol 25, No. 1, Juli 2015: 17-26.